



Kadis Dilarang Hadiri Pelantikan Gubernur Pakai APBD

Kadis Dilarang Hadiri Pelantikan Gubernur Pakai APBD

MAKASSAR, TRIBUN

- Efisiensi anggaran benar-benar mulai diterapkan. Termasuk dalam perjalanan dinas atau menghadiri kegiatan di daerah lain. Terdekat ada pelantikan kepala daerah serentak di Jakarta pada 20 Februari.

Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Fadry Djufray sudah melarang kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berangkat ke Jakarta dengan menggunakan APBD. Lagipula disebutkan hanya Gubernur saja yang diundang. Sementara kepala OPD tidak masuk undangan

agenda pelantikan serentak.

"Memang tidak diundang OPD. Cuma gubernur saja diundang. Sudah kita instruksikan kepala OPD tidak usah pergi dengan gunakan APBD," kata Prof Fadry Djufray di Kantor Gubernur Sulsel pada Selasa (11/2).

Jika ada kepala OPD yang ingin berangkat, Prof Fadry meyakini harus menggunakan anggaran pribadi. Ditegaskan, tidak boleh ada berangkat ke Jakarta menghadiri pelantikan serentak dengan anggaran dinas.

"Tapi kalau ada misalnya mungkin karena keluarganya mau pergi dengan biasa sendiri silahkan. Tapi tidak gunakan APBD dan APBD. Misalkan saudaranya bupati, ya mungkin saja pergi tapi tidak gunakan APBD," lanjutnya.

Di Sulsel ada 14 kepala daerah terpilih asal Sulsel yang tidak bersengketa di MK. Kemudian ada sembilan akhirnya menyusul putusan Dismisal Mahkamah Konstitusi (MK)

Plh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Sulsel Rah-

man Syahid mengatakan sudah mendapat instruksi dari pemerintah pusat agar menyiapkan hotel untuk kepala daerah.

Para kepala daerah ini akan menginap di satu hotel yang sama. Pemprov Sulsel menyiapkan Hotel Borobudur. Langkah ini ditempuh guna memudahkan mobilitas ke Istana pada hari pelantikan.

Pemerintah pusat telah menghimbau agar kepala datang empat hari sebelum pelantikan. Sebab ada sejumlah agenda yang akan dilalui para kepala daerah terpilih. (fqb)